



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG**

**KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali klasifikasi arsip guna memfasilitasi penciptaan, akses, penggunaan, dan penyusutan arsip;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang kearsipan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
  6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERDAGANGAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
2. Fungsi Fasilitatif adalah klasifikasi arsip yang berfungsi sebagai penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan pengorganisasian dan kepegawaian, prosedur dan kebijakan, dan kerumah tanggaan.
3. Fungsi Substantif adalah fungsi lini yang merupakan kegiatan pokok/utama Kementerian Perdagangan.
4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

**Pasal 2**

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengelolaan Arsip Dinamis.

**Pasal 3**

Klasifikasi Arsip Kementerian Perdagangan meliputi:

- a. Fungsi Fasilitatif; dan
- b. Fungsi Substantif.

**Pasal 4**

- (1) Klasifikasi Arsip Kementerian Perdagangan menggunakan kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk kombinasi huruf dan angka.
- (2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip Fasilitatif Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1906); dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2019 Klasifikasi Arsip Substantif Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 246),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1297

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2022  
TENTANG  
KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN

KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. KLASIFIKASI ARSIP BERDASARKAN FUNGSI FASILITATIF

- HM : Hubungan Masyarakat
- HK : Hukum
- KP : Kepegawaian
- KU : Keuangan
- TU : Ketatausahaan
- OT : Organisasi dan Tata Laksana
- PL : Perlengkapan
- PR : Perencanaan
- RT : Kerumahtanggaan
- PW ; Pengawasan
- DL : Pendidikan dan Pelatihan
- BK : Kebijakan Perdagangan
- PP : Penelitian dan Pengembangan
- TI : Teknologi Informasi dan Komunikasi

FUNGSI FASILITATIF

HM. HUBUNGAN MASYARAKAT

- 00 Penerangan dan Publikasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerangan terhadap masyarakat di bidang perdagangan melalui kegiatan publikasi seperti wawancara, wartawan, konferensi pers (press realese), media massa (televisi, radio, surat kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik.
- 01 Dengar pendapat (hearing) Dewan Perwakilan Rakyat  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dengar pendapat (hearing) dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 02 Hubungan Antar Lembaga
  - 02.00 Lembaga Negara

- Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar Kementerian/ Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah.
- 02.01 Organisasi Perdagangan Nasional  
Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan nasional, antara lain Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi, dan Pelaku Usaha.
  - 02.02 Organisasi Perdagangan Internasional  
Naskah yang berkaitan dengan organisasi perdagangan internasional antara lain Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), World Trade Organization (WTO), dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
  - 02.03 Perusahaan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan pihak perusahaan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Swasta).
  - 02.04 Organisasi Kemasyarakatan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan organisasi kemasyarakatan.
  - 02.05 Perguruan Tinggi atau Sekolah  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi atau sekolah termasuk orientasi lapangan dan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
  - 02.06 Bakohumas  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas).
- 03 Keprotokolan
- 03.00 Upacara atau Acara Kedinasan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan.
  - 03.01 Kunjungan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri dan kunjungan dari masyarakat.
  - 03.02 Agenda Pimpinan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadualan, dan pelaksanaan agenda pimpinan antara lain agenda rapat pimpinan.
- 04 Dokumentasi dan Penerbitan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi (pemotretan dan shooting) dan penerbitan buletin, majalah, jurnal, atau naskah sumber, yang meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan penyebaran.
- 05 Penghargaan atau Tanda Kenang-kenangan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang perdagangan.

- 06 Ucapan  
Naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terima kasih, ucapan bela sungkawa, dan ucapan permohonan maaf.
- 07 Dokumen Hosting  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan website.

## HK. HUKUM

- 00 Program Legislasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi Kementerian Perdagangan maupun program legislasi nasional.
- 01 Produk Hukum
  - 01.00 Produk Hukum yang bersifat Pengaturan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti Peraturan perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Prosedur Tetap (Protap) atau Standard Operasional Procedure, Surat Edaran di bidang perdagangan yang meliputi tahapan persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.
  - 01.01 Produk Hukum yang bersifat Penetapan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), yaitu keputusan tentang penetapan kegiatan dan keputusan tentang penetapan pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan sejak awal proses hingga penandatanganan.
- 02 Perjanjian Kerjasama
  - 02.00 Kerjasama Dalam Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama dalam negeri yang meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.
  - 02.01 Kerjasama Luar Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama luar negeri meliputi tahapan persiapan sampai dengan penandatanganan naskah kerjasama.
- 03 Bantuan Hukum
  - 03.00 Bantuan Hukum Kasus Perdata  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di bidang perdagangan.
  - 03.01 Bantuan Hukum Kasus Pidana  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di bidang perdagangan.

- 03.02 Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum Tata Usaha Negara di bidang perdagangan.
- 03.03 Advokasi Hukum  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian pelayanan Advokasi hukum dalam kasus hukum di bidang perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- 04 Telaah Hukum
  - 04.00 Telaah Hukum Internal  
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal Kementerian Perdagangan.
  - 04.01 Telaah Hukum Eksternal  
Naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum untuk eksternal.
- 05 Sosialisasi Hukum  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.
- 06 Dokumentasi Hukum  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, penyebarluasan, dan penyebaran informasi hukum.
- 07 Hak Atas Kekayaan Intelektual  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan masalah sampai dengan penyelesaian masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 08 Kasus Hukum  
Naskah yang berkaitan dengan kasus hukum baik hukum pidana, hukum perdata dan hukum peradilan tata usaha oleh Kementerian Perdagangan.

#### KP. KEPEGAWAIAN

- 00 Formasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil, yang meliputi pengumpulan bahan untuk penyusunan rencana formasi, rencana penempatan pegawai, rencana penetapan klasifikasipendidikan, dan persetujuan formasi
- 01 Pengadaan
  - 01.00 Penerimaan  
Naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai yang meliputi pengumuman penerimaan, penereimaan lamaran, pemanggilan ujian, dan pengumuman akhir penerimaan pegawai

- 01.01 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil  
Naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi pemeriksaan kesehatan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
- 01.02 Prajabatan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi
- 01.03 Penempatan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
- 02 Ujian Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Jabatan
  - 02.00 Ujian Penyesuaian Ijazah  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - 02.01 Ujian Dinas  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - 02.02 Ujian Kompetensi  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi untuk kenaikan jabatan.
- 03 Mutasi
  - 03.00 Kenaikan Pangkat/Golongan  
Naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil.
  - 03.01 Kenaikan Gaji Berkala  
Naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil.
  - 03.02 Penyesuaian Masa Kerja  
Naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji.
  - 03.03 Penyesuaian Tunjangan Keluarga  
Naskah yang berkaitan dengan penyesuaian tunjangan keluarga.
  - 03.04 Promosi  
Naskah yang berkaitan dengan promosi jabatan.
  - 03.05 Rotasi kerja  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan rotasi kerja dalam rangka pemantapan tugas.
  - 03.06 Alih Tugas  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas antara lain mutasi antar instansi, pegawai yang dipekerjakan, dan pegawai yang diperbantukan.

- 04 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan
  - 04.00 Pengangkatan Jabatan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional termasuk pelantikan jabatan.
  - 04.01 Pemberhentian Jabatan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural atau jabatan fungsional.
- 05 Pendelegasian wewenang
  - 05.00 Pelaksana Tugas (Plt)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan apabila pejabat definitifnya belum dilantik.
  - 05.01 Pelaksana Harian (Plh)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak dapat menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, sakit, mengikuti pendidikan dan pelatihan).
- 06 Pengembangan Pegawai
  - 06.00 Program Diploma  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan diploma yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Diploma.
  - 06.01 Program Sarjana  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Sarjana.
  - 06.02 Program Pasca Sarjana  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Pasca Sarjana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Pasca Sarjana.
  - 06.03 Program Doktoral  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Doktoral yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan program Doktoral.
  - 06.04 Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan penjurangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan penjurangan pegawai tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV.
  - 06.05 Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Fungsional  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan fungsional.

- 06.06 Kursus atau Pendidikan dan Pelatihan Teknis  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis yang meliputi perencanaan, pelaporan dan evaluasi kursus atau pendidikan dan pelatihan teknis.
- 07 Administrasi Pegawai
- 07.00 Data dan Keterangan Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai termasuk presensi pegawai.
- 07.01 Kartu Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai.
- 07.02 Kartu Istri dan Kartu Suami  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu).
- 07.03 Kartu Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen)  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu Taspen.
- 07.04 Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  
Naskah yang berkaitan dengan pengurusan BPJS.
- 07.05 Tanda Jasa  
Naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan.
- 08 Pembinaan Pegawai
- 08.00 Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  
Naskah yang berkaitan dengan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
- 08.01 Satuan Kinerja Pegawai (SKP)  
Naskah yang berkaitan dengan penilaian kinerja pegawai.
- 08.02 Pembinaan Mental  
Naskah yang berkaitan dengan pembinaan mental pegawai termasuk ceramah keagamaan.
- 08.03 Hukuman Disiplin  
Naskah yang berkaitan dengan proses pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat/golongan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 09 Pembinaan Jabatan Fungsional
- 09.00 Jabatan Fungsional Arsiparis  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Arsiparis, meliputi pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

- 09.01 Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.
- 09.02 Jabatan Fungsional Widyaiswara  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Widyaiswara, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.
- 09.03 Jabatan Fungsional Peneliti  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Peneliti, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.
- 09.04 Jabatan Fungsional Perencana  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Perencana, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.
- 09.05 Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.
- 09.06 Jabatan Fungsional Auditor  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Auditor, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.
- 09.07 Jabatan fungsional Pustakawan  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pustakawan, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit dan pemberian tunjangan jabatan.
- 09.08 Jabatan fungsional Pranata Komputer  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pranata Komputer, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.
- 09.09 Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.

- 09.10 Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional analis perdagangan meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.
- 09.11 Jabatan Fungsional Penerima dan Pranata Laboratorium Kemetrolgian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, diklat teknis dan fungsional, SK penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetensi Jabatan fungsional SDM kemetrolgian, database, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/in-house seminar jabatan fungsional.
- 09.12 Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Pengawas Kemetrolgian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan SK pengangkatan dan pemberhentian PPNS Metrologi Legal, diklat teknis dan fungsional, peraturan di bidang jabatan fungsional SDM kemetrolgian, standar kompetensi jabatan fungsional SDM kemetrolgian, database, serta evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional.
- 09.13 Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, diklat teknis dan fungsional, SK penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetensi Jabatan fungsional Penguji Mutu Barang, database, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/in-house seminar jabatan fungsional.
- 09.14 Jabatan Fungsional Analis Perdagangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan DUPAK dan PAK, diklat teknis dan fungsional, SK penetapan/pencabutan sebagai pegawai berhak, peraturan standar kompetensi Jabatan fungsional Analis Perdagangan, database, evaluasi dan pelaporan jabatan fungsional, serta bimbingan teknis/in-house seminar jabatan fungsional.
- 09.15 Jabatan Fungsional Lainnya  
Naskah yang berkaitan dengan jabatan fungsional lainnya, meliputi usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional, penilaian angka kredit, penetapan angka kredit, dan pemberian tunjangan jabatan.
- 10 Kesejahteraan
- 10.00 Kesehatan  
Naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, generai check up pejabat.
- 10.01 Cuti  
Naskah yang berkaitan dengan hak cuti pegawai yang meliputi cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara.

- 10.02 **Rekreasi, Kesenian, dan Olah Raga**  
Naskah yang berkaitan dengan rekreasi, kesenian, dan olah raga.
  - 10.03 **Bantuan Sosial**  
Naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk bantuan sosial yang diberikan oleh dan/atau kepada pihak lain, dan sumbangan-sumbangan lainnya.
  - 10.04 **Perumahan**  
Naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Kementerian Perdagangan.
- 11 **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**
- 11.00 **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dengan Hormat**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hak pensiun, yang meliputi proses pengajuan permohonan sampai dengan ditetapkannya keputusan pensiun termasuk pensiun/duda/janda/anak dan Taspen.
  - 11.01 **Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat**  
Naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, meliputi proses pengajuan, proses pemberhentian sampai ditetapkannya keputusan pemberhentian pegawai.
- 12 **Oganisasi Non Kedinasan**
- 12.00 **Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi KORPRI Kementerian Perdagangan.
  - 12.01 **Dharma Wanita**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Kementerian Perdagangan.
  - 12.02 **Koperasi**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Kementerian Perdagangan.
  - 12.03 **Yayasan Kementerian Perdagangan**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
  - 12.04 **Organisasi Lainnya**  
Naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.

## KU. KEUANGAN

### 00 Pelaksanaan Anggaran

- 00.00 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Petunjuk Operasional Kegiatan (DIPA/POK)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan DIPA,POK, dan revisi DIPA/POK.
- 00.01 Rencana Anggaran Belanja (RAB)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan RAB.
- 00.02 Penggajian  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya.
- 00.03 Pengeluaran Anggaran  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, meliputi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SSP-TUP), Surat Kuasa, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bahan Nota Keuangan.

### 01 Pengelolaan Perbendaharaan

- 01.00 Perbendaharaan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara pengeluaran, dan Bendahara penerimaan.
- 01.01 Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat keterangan untuk mendapat tunjangan keluarga dan surat keterangan lainnya.
- 01.02 Kartu Pengawasan Kredit  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran.
- 01.03 Pajak  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).
- 01.04 Penerimaan Non Pajak  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyeteroran non pajak melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Kas Negara.

- 01.05 Pengembalian Belanja  
Naskah yang berkaitan dengan pengembalian belanja, berupa pengembalian belanja pegawai, pengembalian belanja barang, dan pengembalian belanja modal melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
- 01.06 Tagihan Penerimaan Negara  
Naskah yang berkaitan dengan penerimaan negara berupa pendapatan maupun pengembalian belanja melalui Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 01.07 Berita Acara Pemeriksaan Kas  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
- 01.08 Verifikasi Anggaran  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran.
- 01.09 Pembukaan Anggaran  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran berupa Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu (BKP), kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan realisasi anggaran.
- 02 Perhitungan Anggaran  
Naskah yang berkaitan dengan perhitungan anggaran berupa Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
- 03 Ketatausahaan Keuangan
- 03.00 Keterangan Penghasilan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.
- 03.01 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
- 03.02 Permohonan Pinjaman  
Naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman.
- 03.03 Iuran Keanggotaan Organisasi  
Naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi tingkat nasional dan organisasi internasional, meliputi pendaftaran, pembayaran iuran anggota, dan laporan.

TU. KETATAUSAHAAN

00 Persuratan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/ pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahannya, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/ stempel, dan pengiriman surat/ barang cetakan.

00.00 Pengurusan Surat Masuk

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk.

00.01 Pengurusan Surat Keluar

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar.

01 Penggandaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggandaan dalam rangka kedinasan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

02 Kearsipan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Kearsipan dinamis di lingkungan Kementerian Perdagangan.

02.00 Pembinaan Kearsipan (Internal)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan Kearsipan dinamis meliputi bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan teknis, dan fasilitasi fungsional arsiparis.

02.01 Penyusunan Kebijakan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Kearsipan, yang meliputi Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dan kebijakan kearsipan lainnya.

02.02 Penggunaan Arsip Aktif

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan Arsip, seperti daftar Arsip Aktif, dan lain-lain.

02.03 Pemindahan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan Arsip.

02.04 Pemusnahan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan Arsip.

02.05 Penyerahan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyerahan Arsip.

02.06 Layanan Arsip Inaktif

Naskah yang berkaitan dengan layanan Arsip Inaktif seperti daftar Arsip Inaktif, peminjaman Arsip, dan lain-lain.

02.07 Pemeliharaan/Perawatan Arsip

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan/ perawatan arsip.

- 02.08 Program Arsip Terjaga  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan program arsip terjaga.
- 03. Rapat, Rapat Koordinasi, dan Rapat Kerja Teknis  
Naskah yang berkaitan dengan rapat, rapat pimpinan, rapat koordinasi, rapat kerja teknis internal Kementerian Perdagangan, notulen, dan hasil pembahasannya.
- 04. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan Luar negeri termasuk pengurusan passport, visa, exit permit, sampai dengan laporan perjalanan dinas.

#### OT. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- 00 Organisasi  
Naskah yang berkaitan dengan perubahan organisasi yang meliputi analisis, evaluasi, dan perumusan organisasi
- 01 Uraian Tugas  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan uraian tugas unit kerja, jabatan structural, fungsional tertentu, dan fungsional umum.
- 02 Analisis Jabatan dan Beban Kerja  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis, evaluasi, rentang kendali jabatan, dan beban kerja
- 03 Mekanisme kerja  
Naskah yang berkaitan dengan pembuatan mekanisme kerja yang meliputi penyusunan *Standard Operational Procedures* (SOP) dan tata kerja termasuk berkas reformasi birokrasi
- 04 Ketatalaksanaan  
Naskah yang berkaitan dengan ketatalaksanaan termasuk pembuatan pedoman hubungan kerja yang meliputi pola hubungan antar structural, antar fungsional, dan antara structural dengan fungsional

#### PL. PERLENGKAPAN

- 00 Perencanaan Kebutuhan  
Naskah yang berkaitan dengan usulan dan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaannya.
- 01 Pengadaan
  - 01.00 Perencanaan Pengadaan  
Naskah yang berkaitan dengan rangkaian proses/tahapan perencanaan pengadaan
  - 01.01 Tender dan Tender Cepat
    - 01.01.00 Perlengkapan Kantor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) mulai dan proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

01.01.01 Peralatan Kantor

Naskah yang berkaitan dengan pengadaan peralatan kantor seperti meja, kursi, lemari, rak filing kabinet, brankas dan lain sebagainya dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

01.01.02 Tanah dan Bangunan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah dan bangunan kantor termasuk bukti kepemilikan aset/ kekayaan (sertifikat, Izin Mendirikan Bangunan), dan rumah dinas dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.01.03 Jasa

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa mulai dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.01.04 Kendaraan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan beroda dua atau beroda empat termasuk bukti kepemilikan (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)) dari proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.01.05 Instalasi/Jaringan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan instalasi listrik, air, telepon, Local Area Network (LAN), dan sebagainya dan proses awal sampai Berita Acara Serah Terima.

01.01.06 Peralatan Perdagangan Lainnya

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan peralatan perdagangan seperti perangkat alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) mulai dari proses awal sampai Berita Acara Serah terima.

01.02 Seleksi

01.02.00 Konsultan Non Konstruksi

Naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultansi, baik badan usaha maupun perorangan, yang proses pemilihannya melalui mekanisme seleksi dan repeat order

- 01.02.01 Konsultan Konstruksi  
Naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa konsultansi, baik badan usaha maupun perorangan, yang proses pemilihannya melalui mekanisme seleksi dan repeat order
- 01.02.02 Penunjukan Langsung  
Naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang, jasa lainnya atau jasa konsultansi yang prosesnya melalui penunjukan langsung
- 02 Penggunaan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan status penggunaan BMN.
- 03 Pemanfaatan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN mulai dari proses awal usulan sampai terbit izin pemanfaatan dan kontrak antar pihak.
- 04 Distribusi dan penyimpanan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran BMN dari gudang serta pendistribusiannya untuk kepentingan intern maupun ekstern.
- 05 Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pemusnahan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan, penghapusan, dan pemusnahan mulai dari proses awal usulan hingga terbitnya Berita Acara dan Surat Keputusan.
- 06 Penatausahaan dan Inventarisasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penatausahaan maupun inventarisasi BMN di lingkungan Kementerian Perdagangan, seperti Laporan Persediaan, Laporan BMN, dan Laporan Inventarisasi BMN.
- 07 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penetapan kebijakan BMN baik kebijakan umum dan teknis serta kegiatan yang bersifat penertiban dan pemantauan/investigasi.

## PR. PERENCANAAN

- 00 Usulan Perencanaan  
Naskah yang berkaitan dengan usulan perencanaan program kerja dari masing-masing unit kerja.
- 01 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan
  - 01.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJP.
  - 01.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan RPJM.

02 Rencana Kerja Tahunan

02.00 Rencana Kerja Tahunan Kementerian Perdagangan  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Perdagangan, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas dan Rakorbangpus.

02.01 Perjanjian Kinerja  
Naskah yang berkaitan dengan Perjanjian kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan dengan Presiden dan Menteri Koordinator.

03 Penyusunan Rencana Anggaran

03.00 Penyusunan Rencana Anggaran Kementerian Perdagangan  
Naskah yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Perdagangan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional (PO), Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Standar Biaya Khusus (SBK).

03.01 Revisi Dokumen Anggaran  
Naskah yang berhubungan dengan revisi/perubahan dokumen anggaran seperti revisi DIPA dan PO.

04 Laporan

04.00 Laporan Berkala  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan Triwulan, laporan Tahunan) Kementerian Perdagangan.

04.01 Laporan Khusus  
Naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, yang meliputi laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti Pidato Presiden, Rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

04.02 Progress Report  
Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).

04.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.

- 04.04 Evaluasi kegiatan  
Naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi kinerja berdasarkan kegiatan.

## RT. KERUMAHTANGGAAN

### 00 Fasilitas Kantor

#### 00.00 Kendaraan Dinas

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, dan laporan kehilangan kendaraan.

#### 00.01 Ruang Rapat dan Konsumsi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat termasuk penyediaan konsumsi dan administrasinya.

#### 00.02 Telekomunikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).

#### 00.03 Rumah Jabatan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan rumah jabatan seperti perawatan dan pemeliharaan fisik bangunan rumah jabatan dan pengamanannya.

### 01 Tata Ruang

Naskah yang berkaitan dengan pengaturan dan penataan ruangan baik ruang kerja maupun ruang publik.

### 02 Pemeliharaan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi, perbaikan/ service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor.

### 03 Pengamanan

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan lingkungan kantorseperti daftar piket satpam/ security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk lingkungan kantor Kementerian Perdagangan dan pengaturan perpakiran termasuk kartu parkir

## PW. PENGAWASAN

### 00 Audit

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit seperti audit operasional, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit BMN, serta kegiatan audit lainnya yang meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

### 01 Review

Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan review atas pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan baik semesteran maupun tahunan,

meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan sampai dengan pelaporan.

02 Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta evaluasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat menyurat sampai dengan laporan.

03 Pengaduan Masyarakat

03.00 Internal

Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari internal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya.

03.01 Eksternal

Naskah yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat yang datang dari eksternal Kementerian Perdagangan dan laporan penyelesaiannya.

04 Pengawasan Melekat

Naskah yang berkaitan dengan pengawasan melekat, proses pemeriksaan pengawasan sampai dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, termasuk pakta integritas.

05 Laporan Hasil Pengawasan

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan semesteran dan tahunan, yang meliputi ikhtisar laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Perdagangan yang disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

06 Pemantauan

06.00 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan/ Program

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan/ program dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi kegiatan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

06.01 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) meliputi Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang/uang, Keputusan tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, Keputusan penghapusan uang dan barang, dan laporan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- 06.02 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)  
Naskah yang berkaitan dengan laporan hasil pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, atau Laporan Hasil Pemeriksaan lainnya yang ditindaklanjuti sampai dengan pelaporan.
- 06.03 Penerapan *Early Warning System*  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi kepada unit kerja terhadap pengelolaan keuangan negara sampai dengan laporan.
- 06.04 Pemantauan Disiplin Pegawai  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan sampai dengan laporan.
- 07 Kegiatan pengawasan lainnya  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, keikutsertaan dalam forum bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan forum komunikasi lainnya.

#### DL. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 00 Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan
  - 00.00 Perencanaan Kebutuhan  
Naskah yang berkaitan dengan analisa/perencanaan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi anggaran, peserta, waktu pelaksanaan, sistem dan metode, bahan ajar, kurikulum/silabus, tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan.
  - 00.01 Sistem dan Metode  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan sistem dan metode pendidikan dan pelatihan perdagangan.
  - 00.02 Kurikulum/Silabus  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan kurikulum/silabus pendidikan dan pelatihan perdagangan.
  - 00.03 Bahan Ajar/Modul  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan bahan ajar/modul pendidikan dan pelatihan perdagangan.
  - 00.04 Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian konsultasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 01 Penyelenggaraan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan
  - 01.00 Pendidikan dan pelatihan Teknis Perdagangan

- Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait teknis bidang Perdagangan.
- 01.01 Pendidikan dan pelatihan non teknis Perdagangan  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan terkait non teknis bidang Perdagangan.
  - 01.02 Teknis Pimpinan Lembaga/ Unit Perdagangan  
Naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perdagangan bagi pimpinan lembaga perdagangan dan pimpinan unit perdagangan.
  - 01.03 Evaluasi Pasca Pendidikan dan pelatihan  
Naskah yang berkaitan dengan evaluasi setelah pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan.
- 02 Database Tenaga Pengajar  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan database tenaga pengajar perdagangan.
- 03 Database Alumni  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan database alumni pendidikan dan pelatihan perdagangan.
- 04 Perencanaan dan Persiapan Diklat Ekspor
- 04.00 Analisis Kebutuhan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan ekspor.
  - 04.01 Pengembangan Kurikulum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan bahan pelaksanaan pengembangan metodologi dan kurikulum.
  - 04.02 Promosi dan Publikasi  
Naskah-naskah yang nberkaitan dengan persiapan pelaksanaan promosi, publikasi, dan hubungan masyarakat.
  - 04.03 Kerjasama dan Pelayanan Jasa  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kerjasama dan pelayanan jasa konsultasi, pendampingan dan monitoring, peningkatan kompetensi SDM Ekspor, peningkatan jejaring dan pembinaan alumni.
- 05 Penyelenggaraan Diklat Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.
- 06 Monitoring dan Evaluasi Diklat Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan ekspor
- 07 Database tenaga Pengajar Diklat Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan database tenaga pengajar

- 08 Database peserta pelatihan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan database Peserta pelatihan pendidikan dan pelatihan ekspor.

#### BK. KEBIJAKAN PERDAGANGAN.

##### 00. Analisis Kebijakan/Rekomendasi Kebijakan.

- 00.00 Kebijakan Perdagangan Domestik.  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan analisis, pemantauan, dan evaluasi, forum diskusi, pemberian rekomendasi dan penyiapan bahan pimpinan, meliputi bidang stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok, barang penting, logistik, distribusi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen, tertib niaga, tertib mutu, tertib ukur, jasa perdagangan serta pembinaan usaha.
- 00.01 Kebijakan Perdagangan Internasional.  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan analisis, pemantauan, dan evaluasi, forum diskusi, pemberian rekomendasi dan penyiapan bahan pimpinan, meliputi bidang kerja sama dan perjanjian multilateral, regional, bilateral serta akses pasar barang dan jasa.
- 00.02 Kebijakan Ekpor Impor dan Pengamanan Perdagangan.  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan, pelaksanaan analisis, pemantauan, dan evaluasi, forum diskusi, pemberian rekomendasi dan penyiapan bahan pimpinan, meliputi bidang pengembangan ekspor barang dan jasa, pengendalian impor serta perlindungan dan pengamanan pasar domestik dan pasar ekspor.

#### PP. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN

##### 00 Pengkajian

- 00.00 Sistem Perdagangan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sistem perdagangan dinamis maupun statis yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.
- 00.01 Kelembagaan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait kelembagaan perdagangan yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.

- 00.02 Sumber Daya Manusia  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian sumber daya manusia perdagangan baik yang berada di unit pencipta Arsip maupun lembaga perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.
- 00.03 Sarana Prasarana  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian terkait sarana prasarana perdagangan, yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir dan pencetakan, study referensi, penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data/ survey, analisis data, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyusunan draft akhir, dan pencetakan.
- 01 Pengembangan
- 01.00 Sistem Perdagangan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian sistem perdagangan dinamis maupun statis yang berupa penyusunan norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.
- 01.01 Kelembagaan  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait kelembagaan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.
- 01.02 Sumber Daya Manusia  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian Sumber Daya Manusia Perdagangan yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisisioner dan pedoman wawancara, pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.
- 01.03 Sarana Prasarana  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan hasil pengkajian terkait sarana dan prasarana yang berupa penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang meliputi rapat persiapan, study referensi, penyusunan kuisisioner dan pedoman wawancara,

pelaksanaan survey, pembahasan hasil survey, penyusunan draft awal, ekspose, penyempurnaan dan finalisasi NSPK, dan pencetakan.

02 Diseminasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran hasil kajiandan NSPK yang telah disusun yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi.

03 Publikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan perdagangan melalui Jurnal/Bunga Rampai/Leaflet/Warta yang meliputi kegiatan pembentukan dewan redaksi, pengumuman penulisan, penentuan tema, pengumpulan artikel/karya ilmiah, proses review, proses editing, pembuatan dummy, pencetakan, dan pendistribusian.

04 Seminar/Call of Paper/Bedah Naskah

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan untuk mendukung pengelolaan publikasi jurnal/bunga rampai yang meliputi kegiatan persiapan, penyelenggaraan, dan evaluasi.

## TI. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

00. Kebijakan. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi teknologi informasi dan komunikasi serta data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

01 Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

01.00 Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi masterplan dan roadmap teknologi informasi dan komunikasi serta indikator kinerja teknologi informasi dan komunikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi rencana strategis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lainlain.

01.01 Arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi (infrastruktur), antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen

terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi arsitektur teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.

- 01.02 **Perencanaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi risk assessment dan rencana tindakan penanganan risiko, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi perencanaan manajemen risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.
- 01.03 **Perencanaan Manajemen Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi analisis cost benefit, evaluasi investasi dan risikonya, serta penentuan prioritas investasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain.
- 01.04 **Perencanaan Manajemen Data dan Informasi**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan manajemen data dan informasi meliputi analisis kebutuhan data dan informasi, serta penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dan lain-lain.
- 02 **Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**
- 02.00 **Pengembangan Infrastruktur**  
Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan infrastruktur, dan lain-lain.
- 02.01 **Pengembangan Aplikasi**  
Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan aplikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan aplikasi, dan lain-lain.
- 02.02 **Pengembangan Basis Data**  
Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan basis data meliputi implementasi kebijakan dan

perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan basis data, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan basis data, dan lain-lain.

02.03 Pengembangan Data dan Informasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengembangan data dan informasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengembangan data dan informasi, dan lain-lain.

03 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

03.00 Pengelolaan Infrastruktur

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan infrastruktur meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, ndokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan infrastruktur, dan lain-lain.

03.01 Pengelolaan Aplikasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan aplikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan aplikasi, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan aplikasi, dan lain-lain.

03.02 Pengelolaan Basis Data

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan basis data meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan basis data, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan basis data, dan lain-lain.

03.03 Pengelolaan Data dan Informasi

Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi, antara blain berupa naskah persuratan, surat keputusan, bprosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi pengelolaan data dan informasi, dan lain-lain.

- 03.04 Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan teknologi informasi dan komunikasi beserta help desk-nya seperti layanan email, wifi, troubleshoot, pembuatan subdomain, dan penempatan server, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan, dokumen terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi layanan teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain.
- 03.05 Layanan Data dan Informasi  
Naskah yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan layanan data dan informasi meliputi implementasi kebijakan dan perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan layanan data dan informasi beserta help desk-nya, antara lain berupa naskah persuratan, surat keputusan, prosedur dan instruksi kerja, notulensi rapat, laporan kegiatan,

II. KLASIFIKASI ARSIP BERDASARKAN FUNGSI SUBSTANTIF  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

A. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

- BU : BINA USAHA PERDAGANGAN
- DN : PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
- SL : SARANA PERDAGANGAN DAN LOGISTIK
- BP : BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING
- EJ : PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA

B. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

- EP : EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
- IP : EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
- IT : IMPOR
- EI : FASILITASI EKSPOR IMPOR
- PD : PENGAMANAN PERDAGANGAN

C. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

- SM : STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
- MR : METROLOGI
- TN : TERTIB NIAGA
- PK : PEMBERDAYAAN KONSUMEN
- BJ : PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

D. BIDANG PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- PO : PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
- PA : PERUNDINGAN ASEAN
- AO : ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI DUNIA
- PB : PERUNDINGAN BILATERAL
- PJ : PERUNDINGAN PERDAGANGAN DAN JASA

E. BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

- IE : PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR
- KE : KERJASAMA PENGEMBANGAN EKSPOR
- PE : PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
- PC : PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA

F. BIDANG PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- UD : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
- PF : PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS
- BK : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR
- SP : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG (SRG) DAN PASAR LELANG KOMODITAS (PLK)

FUNGSI SUBSTANTIF

A. BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI  
BU. BINA USAHA PERDAGANGAN

00 Penyusunan Kebijakan di bidang Distribusi Barang

00.00 Distribusi Langsung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang distribusi barang secara langsung.

00.01 Distribusi Tidak Langsung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang distribusi barang secara tidak langsung.

00.02 Waralaba

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang waralaba.

00.03 Informasi Perusahaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan norma-norma, kebijakan, dan peraturan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan dan penyajian data, serta pelaporan terkait kebijakan di bidang Informasi Perusahaan.

01 Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan

01.00 Distribusi Langsung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang distribusi langsung.

01.01 Distribusi Tidak Langsung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang distribusi tidak langsung.

01.02 Waralaba

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang waralaba.

01.03 Informasi Perusahaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan pelaku usaha, baik

berupa sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi, dan fasilitasi di bidang informasi perusahaan.

02 Pemantauan dan Evaluasi

02.00 Pemantauan dan Evaluasi Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan sistem kinerja keuangan, program, dan anggaran oleh tim audit internal.

02.01 Pemantauan dan Evaluasi Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan sistem kinerja keuangan, program, dan anggaran oleh tim audit eksternal.

DN. PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

00 Iklim Usaha

00.01 Iklim Usaha Pembinaan Terhadap Usaha Kecil Menengah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan kebijakan/pedoman bagi Usaha Kecil Menengah seperti pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) s/d konsep Rancangan Peraturan.

00.02 Bimbingan Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimtek tentang pengembangan pemasaran, kemasan, dan pendampingan serta fasilitasi antara lain berkaitan dengan pengelolaan keuangan bagi usaha kecil dan menengah, dari surat pemberitahuan s/d laporan kegiatan.

01 Fasilitas Usaha dan Pemasaran

01.00 Fasilitas Usaha Produktif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi usaha produktif, serta surat persetujuan pemberian bantuan sarana usaha perdagangan dalam bentuk barang seperti gerobak, tenda, packaging, fasilitasi halal, Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan fasilitasi usaha produktif melalui kegiatan serta fasilitasi usaha produktif melalui proposal dinas, dan lain-lain.

01.01 Pemasaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran dalam bentuk online dan pemasaran dalam bentuk konvensional seperti kemitraan dan partisipasi pameran, seperti kerjasama pameran dengan pemerintah daerah dalam bentuk partisipasi pameran dan pameran Produk Unggulan Daerah serta kerjasama dengan toko/retail modern.

02 Pengembangan Produk Lokal

02.00 Penelaah Potensi Produk

Naskah-naskah yang berkaitan dengan identifikasi produk unggulan daerah seperti permohonan data ke dinas daerah s/d profil produk.

02.01 Database UMKM

Naskah-naskah yang berkaitan dengan data UMKM binaan Kementerian Perdagangan dalam bentuk etalase produk Indonesia.

03 Pencitraan Produk Dalam Negeri

03.00 Kerjasama Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi Aku cinta Indonesia dengan sekolah dan pelaku usaha dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri kepada anak didik dan generasi muda/masyarakat dari surat pemberitahuan kegiatan s/d laporan kegiatan

03.01 Peningkatan Promosi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri seperti TV Placement, Merchandise, Kampanye Melalui Media Sosial/Periklanan di TV nasional, Kampanye Cinta Produk Indonesia yang mencakup antara lain : Identifikasi Produk Unggulan Berbasis Budaya, Hari Pakai Produk, Pemetaan Pola Konsumsi dan lain-lain.

SL. SARANA PERDAGANGAN DAN LOGISTIK

00 Sarana Perdagangan

00.00 Pengembangan Sarana Perdagangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait kegiatan pengembangan sarana perdagangan.

00.01 Koordinasi Antar Instansi, Identifikasi/Justifikasi Teknis Usulan Sarana Perdagangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi Antar Instansi dan Identifikasi/Justifikasi Teknis Usulan Pengembangan Sarana Perdagangan.

00.02 Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan, mulai dari perencanaan, penelaahan/reviu pengembangan sarana perdagangan, kunjungan kerja pimpinan dan peresmian sarana perdagangan.

01 Pembinaan Sarana Perdagangan

01.00 Pasar Rakyat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan pembinaan pelaku sarana perdagangan antara lain terkait Pasar Rakyat.

- 01.01 Gudang, Pusat Distribusi dan Minuman Beralkohol  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan pembinaan pelaku sarana perdagangan antara lain terkait Gudang, Pusat Distribusi dan Minuman Beralkohol.

## 02 Kerja Sama Logistik

- 02.00 Kerja Sama Logistik Pemerintah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan kerja sama logistik pemerintah.
- 02.01 Kerja Sama Logistik Non Pemerintah  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan kerja sama logistik non pemerintah.
- 02.02 Pengembangan Informasi Logistik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan pengembangan informasi logistik.

## 03 Perdagangan Antarpulau, Darat dan Perbatasan

- 03.00 Antarpulau dan Darat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan atau pemantauan perdagangan antarpulau dan darat.
- 03.01 Perbatasan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan kegiatan atau pemantauan perdagangan perbatasan.

## 04 Pemantauan Sarana Perdagangan

- 04.00 Pemerintah

Naskah-Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rapat koordinasi/bimbingan teknis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah guna terlaksananya Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Perdagangan sesuai dengan ketentuan.

- 04.01 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Perdagangan.

#### BP. BAHAN POKOK DAN BARANG PENTING

##### 00 Barang Kebutuhan Pokok

- 00.00 Hasil Pertanian dan Peternakan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis; pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi beras, kedelai, jagung, susu, daging sapi, daging ayam, telur, cabai, dan bawang.
- 00.01 Hasil Industri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis; pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi gula, minyak goreng, terigu.
- 00.02 Hasil Perikanan Kelautan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi ikan kembung, ikan tuna, ikan tongkol dan ikan cakalang.

##### 01 Barang Penting

- 01.00 Hasil Industri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi semen, besi beton, baja ringan, triplek, dan barang berbahaya (B2) dalam pengawasan.
- 01.01 Penunjang Pertanian dan Pertambangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi meliputi pupuk non subsidi, pupuk bersubsidi dalam pengawasan, elpiji bersubsidi, dan benih pajale.

## 02 Informasi Pasar

### 02.00 Informasi Harga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

### 02.01 Informasi Stok

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis dan monitoring meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.

## 03 Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

### 03.00 Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang kebutuhan pokok yang meliputi komoditi beras, kedelai, daging, telur, cabai, bawang, gula, minyak goreng, terigu, dan ikan segar.

### 03.01 Hewan dan Non Serelia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan barang penting meliputi benih pajale, pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi dan baja ringan.

## EJ. PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA

### 00 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

#### 00.00 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan, dan peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait perdagangan melalui sistem elektronik.

#### 00.01 Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga.

#### 00.02 Data dan Informasi Perijinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemrosesan perizinan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait perdagangan melalui sistem elektronik.

### 01 Perdagangan Jasa

#### 01.00 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Jasa Bisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi norma-norma, kebijakan, peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait Jasa Bisnis.

- 01.01 Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Jasa Non Bisnis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan diseminasi/sosialisasi, norma-norma, kebijakan, peraturan, bimbingan teknis, kompetensi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyiapan serta penyajian data, laporan terkait Jasa non Bisnis.
- 01.02 Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga.

## B. BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

### EP. EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN

#### 00 Tanaman Pangan dan Holtikultura

- 00.00 Persetujuan Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- 00.01 Bimbingan Teknis/FGD dll  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain tentang Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- 00.02 Database Eksportir  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan database eksportir Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- 00.03 Identifikasi Komoditi Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru terkait Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- 00.04 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Tanaman Pangan dan Holtikultura.

#### 01 Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan

- 01.00 Persetujuan Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.
- 01.01 Eksportir Terdaftar  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian persetujuan eksportir terdaftar (ET) Sarang Burung Walet.

- 01.02    Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) Kulit.
- 01.03    Bimbingan Teknis/FGD dll  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain tentang Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.
- 01.04    Database Eksportir  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan database eksportir Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.
- 01.05    Identifikasi Komoditi Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru terkait Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.
- 01.06    Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi Tumbuhan Alam Satwa Liar, Peternakan dan Perikanan.
- 02    Perkebunan
- 02.00    Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Rancangan Kebijakan permendag harga patokan ekspor (HPE) hasil perkebunan.
- 02.01    Persetujuan Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) *Crude Palm Oil* (CPO).
- 02.02    Harga Referensi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan harga referensi biji kakao dan CPO.
- 02.03    Daftar Merek  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar merek *refined, bleached and deodorized* (RBD) *palm olein*.
- 02.04    Identifikasi Komoditi Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru mengenai hasil perkebunan.
- 02.05    Database  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan database perkebunan.

- 02.06 Bimbingan Teknis/FGD/dan lain lain  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain mengenai perkebunan.
- 02.07 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.
- 03 Tanaman Bahan Penyegar dan Rempah-rempah
  - 03.00 Persetujuan Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat persetujuan ekspor (SPE) Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.
  - 03.01 Bimbingan Teknis/FGD dll  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain berkaitan Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.
  - 03.02 Database Eksportir  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.
  - 03.03 Identifikasi Komoditi Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru Tanaman bahan penyegar dan rempah-rempah.
  - 03.04 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
- 04 Kehutanan
  - 04.00 Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE) kehutanan.
  - 04.01 Identifikasi Komoditi Baru  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi baru kehutanan.
  - 04.02 Database  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan database kehutanan.
  - 04.03 Bimbingan Teknis/FGD/dan lain lain  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/FGD/dan lain-lain kehutanan.
  - 04.04 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kehutanan.

IP. EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN

00 Aneka Industri dan Jasa

- 00.00 Perizinan Ekspor  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk aneka industri dan jasa.
- 00.01 Bimbingan Teknis/*Focus Group Discussion*  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* berkaitan produk aneka industri dan jasa.
- 00.02 Database Eksportir  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produk aneka industri dan jasa.
- 00.03 Identifikasi Komoditi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk aneka industri dan jasa.
- 00.04 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk aneka industri dan jasa.

01 Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

- 01.00 Perizinan Ekspor  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
- 01.01 Bimbingan Teknis/*Focus Group Discussion*  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* berkaitan produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
- 01.02 Database Eksportir  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
- 01.03 Identifikasi Komoditi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.
- 01.04 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika.

02 Industri Agro dan Kimia

- 00.00 Perizinan Ekspor

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk industri agro dan kimia.

- 00.01 *Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion*  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* berkaitan produk industri agro dan kimia.
- 00.02 Database Eksportir  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produksi industri agro dan kimia.
- 00.03 Identifikasi Komoditi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk industri agro dan kimia.
- 00.04 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk industri agro dan kimia.

#### 01 Pertambangan dan Batubara

- 03.00 Perizinan Ekspor  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk pertambangan dan batubara.
- 03.01 *Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion*  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* berkaitan produk pertambangan dan batubara.
- 03.02 Database Eksportir  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produk pertambangan dan batubara.
- 03.03 Identifikasi Komoditi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk pertambangan dan batubara.
- 03.04 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk pertambangan dan batubara.
- 03.05 Penyiapan Rancangan Kebijakan Permendag Harga Patokan Ekspor (HPE)  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan rancangan kebijakan permendag harga patokan ekspor (HPE) produk pertambangan.

#### 04 Minyak Bumi dan Gas Bumi

- 02.00 Perizinan Ekspor  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses pemberian surat perizinan ekspor produk minyak bumi dan gas bumi.

- 02.01 *Bimbingan Teknis/Focus Group Discussion*  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis/*Focus Group Discussion* berkaitan produk minyak bumi dan gas bumi serta dukungan layanan perizinan ekspor.
- 02.02 *Database Eksportir*  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan database eksportir berkaitan dengan produk minyak bumi dan gas bumi.
- 02.03 *Identifikasi Komoditi*  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi komoditi produk minyak bumi dan gas bumi.
- 02.04 *Monitoring dan Evaluasi*  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi produk minyak bumi dan gas bumi.

#### IT. IMPOR

##### 00 Barang Modal

- 00.00 *Perizinan Berusaha*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang modal
- 00.01 *Surat Keterangan*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang modal
- 00.02 *Sosialisasi/FGD/Bimtek*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang modal
- 00.03 *Monitoring dan Evaluasi*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang modal
- 00.04 *Database Impor*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Database* Impor barang modal

##### 01 Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

- 01.00 *Perizinan Berusaha*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
- 01.01 *Surat Keterangan*  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
- 01.02 *Sosialisasi/FGD/Bimtek*

- Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
- 01.03 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
- 01.04 *Database* Impor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Database* Impor barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan
- 02 Barang Aneka Industri dan Bahan Baku Industri
- 02.00 Perizinan Berusaha  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang aneka industri dan bahan baku industri
- 02.01 Surat Keterangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang aneka industri dan bahan baku industri
- 02.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang aneka industri dan bahan baku industri
- 02.03 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang aneka industri dan bahan baku industri
- 02.04 *Database* Impor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Database* Impor barang aneka industri dan bahan baku industri
- 03 Barang Konsumsi
- 03.00 Perizinan Berusaha  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang konsumsi
- 03.01 Surat Keterangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang konsumsi
- 03.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang konsumsi
- 03.03 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang konsumsi

- 03.04 *Database* Impor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Database* Impor barang konsumsi
- 04 Barang Kimia, Tambang dan Limbah
  - 04.00 Perizinan Berusaha  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang kimia, tambang dan limbah
  - 04.01 Surat Keterangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang kimia, tambang dan limbah
  - 04.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang kimia, tambang dan limbah
  - 04.03 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang kimia, tambang dan limbah
  - 04.04 *Database* Impor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Database* Impor barang kimia, tambang dan limbah
- 05 Barang Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
  - 05.00 Perizinan Berusaha  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha di bidang impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan
  - 05.01 Surat Keterangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Surat Keterangan impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan
  - 05.02 Sosialisasi/FGD/Bimtek  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sosialisasi/FGD/Bimtek di bidang impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan
  - 05.03 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi importasi barang kehutanan, kelautan dan perikanan
  - 05.04 *Database* Impor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Database* Impor barang kehutanan, kelautan dan perikanan
- 06 Kebijakan Impor Lainnya  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tanggapan, penjelasan dan penyampaian data di bidang impor

## EI. FASILITAS EKSPOR DAN IMPOR

### 00 Ketentuan Asal Barang dan Dokumen Keterangan Asal

- 00.00 Skema dan Prosedur Ketentuan Asal Barang  
Naskah yang berkaitan dengan konsep skema ketentuan asal barang dalam rangka koordinasi perundingan perdagangan dengan negara mitra, penyusunan rumusan konsep kebijakan ketentuan asal barang, sebagai implementasi kesepakatan perundingan perdagangan dengan negara mitra, rancangan keputusan penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dan pejabat IPSKA, serta pelaksanaan publikasi, sosialisasi, dan evaluasi kebijakan ketentuan asal barang.
- 00.01 Dokumen Keterangan Asal  
Naskah yang berkaitan dengan proses bisnis, sistem pelayanan, penanganan kendala, konsultasi, asistensi dan *workshop* dalam rangka implementasi dan monitoring Dokumen Keterangan Asal yaitu Surat Keterangan Asal (SKA), Dokumen Asal Barang (DAB), monitoring Eksportir Tersertifikasi (ES) dan Eksportir Teregistrasi (ER).
- 00.02 Eksportir Tersertifikasi (ES)  
Naskah yang berkaitan dengan *output* penetapan sebagai Eksportir Tersertifikasi (ES).
- 00.03 *Retroactive Check dan Rejection SKA*  
Naskah yang berkaitan dengan penanganan permintaan *retroactive check* dan *rejection SKA* dari negara mitra.
- 00.04 Data dan Informasi Dokumen Keterangan Asal  
Naskah yang berkaitan dengan permintaan data dari pemangku kepentingan mengenai eksportir dan komoditi dalam Dokumen Keterangan Asal.

### 01 Fasilitasi Akses Pasar

- 01.00 Informasi Akses Pasar  
Naskah yang berkaitan dengan diseminasi dan penyebarluasan informasi akses pasar ekspor kepada pelaku usaha dan instansi terkait.
- 01.01 Optimalisasi Akses Pasar Tujuan Ekspor  
Naskah yang berkaitan dengan koordinasi untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memanfaatkan akses pasar ekspor, penanganan kendala atau hambatan di negara tujuan ekspor, analisa, pemetaan dan strategi optimalisasi akses pasar ekspor.

### 02 Fasilitasi Perdagangan dan Kerjasama Ekspor dan Impor

- 02.00 Fasilitasi Perdagangan dalam Lingkup WTO  
Naskah yang berkaitan dengan program kerja Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP), isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam lingkup WTO TFA dan *Home*

*Contact Point* atas permasalahan yang disampaikan oleh pelaku usaha atau instansi terkait

- 02.01 Fasilitasi Perdagangan dalam Lingkup Kerjasama Perdagangan Lainnya  
Naskah yang berkaitan dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan dalam ASEAN – TF, isu Fasilitasi Perdagangan di Forum Bilateral, Regional, serta Multilateral/Organisasi Internasional lainnya dan *Home Contact Point* atas permasalahan yang disampaikan oleh pelaku usaha atau instansi terkait
  - 02.02 Fasilitasi *Tariff Rate Quote* (TRQ)  
Naskah berkaitan dengan implementasi fasilitasi *Tariff Rate Quote* (TRQ) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - 02.03 Fasilitasi Kerjasama Ekspor dan Impor  
Naskah berkaitan dengan implementasi fasilitasi kerja sama dan bantuan negara/lembaga pemberi donor terkait dengan fasilitasi ekspor dan impor
- 03 Pelayanan Ekspor dan Impor
- 03.00 Fasilitasi Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor  
Naskah yang berkaitan dengan konsep kebijakan, sistem layanan dan proses bisnis, publikasi, sosialisasi, bimbingan teknis, data dan informasi, analisis, monitoring dan evaluasi kebijakan dan sistem pelayanan ekspor dan impor
  - 03.01 Fasilitasi Implementasi dan Integrasi Sistem Pelayanan Ekspor dan Impor  
Naskah yang berkaitan dengan integrasi sistem layanan dan digitalisasi perizinan ekspor dan impor, penanganan kendala, konsultasi dan asistensi implmentasi sistem pelayanan ekspor dan impor
  - 03.02 Eksportir dan Importir Bereputasi Baik  
Naskah yang berkaitan dengan eksportir dan importir bereputasi baik.
- 04 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perdagangan
- 04.00 Kawasan Perdagangan Khusus  
Naskah yang berkaitan dengan rumusan konsep kebijakan, masukan, analisis, penanganan isu, monitoring dan evaluasi kebijakan fasilitasi kegiatan ekspor dan impor di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Perbatasan, dan kawasan perdagangan khusus lainnya.
  - 02.01 Transportasi dan Kepelabuhanan  
Naskah yang berkaitan dengan rumusan konsep kebijakan, masukan, analisis, penanganan isu, monitoring dan evaluasi kebijakan fasilitasi kelancaran arus barang dan logistik dalam kegiatan ekspor dan impor.

03 Fasilitasi Cara Perdagangan dan Sistem Pembayaran

- 05.00 Kebijakan dan Skema Imbal Dagang  
Naskah yang berkaitan dengan pemetaan potensi produk, analisa data dalam rangka skema imbal dagang dan rumusan konsep kebijakan skema imbal dagang
  - 05.01 Penjajakan dan Implementasi Skema Imbal Dagang  
Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi penjajakan, implementasi skema imbal dagang dengan negara mitra dan penanganan isu atau kendala dalam pelaksanaan skema imbal dagang, monitoring dan evaluasi proses penjajakan dan implementasi imbal dagang
  - 05.02 Kebijakan Fasilitasi Sistem Pembayaran  
Naskah yang berkaitan dengan pemetaan potensi produk, analisa data dalam rangka rumusan konsep kebijakan sistem pembayaran dan evaluasi atas implementasi kebijakan
  - 05.03 Fasilitasi Sistem Pembayaran  
Naskah yang berkaitan dengan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam pemanfaatan sistem pembayaran ekspor dan impor dan penanganan isu bersama dengan instansi terkait
- 06 Fasilitasi Sistem Pembiayaan
- 06.01 Kebijakan Fasilitasi Pembiayaan  
Naskah yang berkaitan dengan pemetaan, analisa data produk dan pelaku usaha, analisis skema pembiayaan ekspor dalam rangka rumusan konsep kebijakan sistem pembiayaan dan rekomendasi skema pembiayaan ekspor
  - 06.02 Implementasi Fasilitasi Pembiayaan  
Naskah yang berkaitan dengan diseminasi, bimbingan teknis, asistensi kurasi pelaku usaha, dan usulan pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitasi akses pembiayaan ekspor.

PD. PENGAMANAN PERDAGANGAN

- 00 Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan hambatan teknis perdagangan yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi/laporan pelaku usaha dari perwakilan indonesia/kebijakan dari otoritas negara tujuan ekspor, konsultasi/pertemuan untuk penanganan di negara mitra dagang, fasilitasi penyelesaian sengketa, FGD, Monev, pencatatan riwayat penanganan kasus di profil kasus.
- 01 Penanganan Tuduhan Dumping, Subsidi, Safeguard  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan tuduhan dumping, subsidi, safeguard yang meliputi dokumen notifikasi/inisiasi dari negara penuduh, dokumen petisi, surat *interested parties*, dokumen kuesioner, advokasi/pendampingan teknis penanganan hambatan perdagangan, penyusunan submisi/tanggapan pemerintah, dengar pendapat, pendampingan saat *on the spot investigation*, verifikasi kasus tuduhan subsidi,

dokumen *provisional measures disclosure*, dokumen *final determinaton*, penyampaian hasil.

- 02 Pengajuan Dispute Settlement Body (DSB) WTO  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengajuan DSB WTO terhadap penanganan tuduhan dumping, surat dan draft permintaan legal opinion ke ACWL, permintaan konsultasi, surat dirjen terkait permintaan pengajuan *dispute*, surat notifikasi dari indonesia ke WTO, pembentukan panel (*establishment, composition*), *first written submission, first meeting on the panel, second written submission, second meeting panel, panel report issued to the parties*.
- 03 Database  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan database penanganan perdagangan meliputi profil kasus, dokumen terkait (petisi, submisi, *preliminary measures, final determination, legal drafting*, profil perusahaan, profil negara).
- 04 Bimbingan Teknis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimtek hambatan perdagangan.

### C. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

#### SM. STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

- 00 Perumusan Standar dan Kebijakan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rancangan standar dan kebijakan standardisasi dibidang Perdagangan yang sesuai dengan peraturan Perdagangan dan Peraturan lainnya.
02. Penerapan Standar dan Kebijakan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerapan standar dan kebijakan di bidang Perdagangan.
- 02 Verifikasi Mutu  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan Nomor Pendaftaran Barang (NPB), pendaftaran barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L), pendaftaran, perpanjangan, dan perubahan ruang lingkup Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), pendaftaran Tanda Pengenal Produsen (TPP) SIR, dan verifikasi mutu produk sesuai dengan ketentuan.
03. Kelembagaan Standardisasi Nasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan standardisasi nasional, sistem mutu, dan survei kepuasan pelanggan.
04. Kelembagaan Standardisasi Internasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan standardisasi internasional.
05. Sarana dan Informasi Mutu  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standar acuan mutu produk, komoditi sesuai dengan ketentuan, informasi standar mitra tujuan ekspor, promosi dan publikasi standardisasi.

06. Pengujian Mutu Barang

- 00.00 Pelayanan Jasa Pengujian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan jasa pengujian.
- 00.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Jasa Pengujian  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jasa pengujian.

07. Kalibrasi

- 07.00 Pelayanan Jasa Kalibrasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan jasa kalibrasi.
- 07.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Jasa Kalibrasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jasa kalibrasi.

08. Sertifikasi

- 08.00 Pelayanan Jasa Sertifikasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan sertifikasi produk, pelayanan sertifikasi person dan pemeriksa halal.
- 08.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Jasa Sertifikasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pemeliharaan jasa sertifikasi.

MR. METROLOGI

03 Sarana dan Kerja sama

- 03.00 Sarana Metrologi Legal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimtek kepada Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) dan Dinas, Cap Tanda Tera (CTT), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan laporan kemetrologian dari UPTD dan Dinas.
- 03.01 Kerjasama Metrologi Legal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama baik dalam dan luar negeri di bidang Kemetrologian antara lain nota kesepahaman/MoU Kerjasama, partisipasi sidang luar negeri, workshop kemetrologian negara anggota *Asia pasific Legal Metrology Forum*, dan lain-lain.
- 03.02 Peraturan Perundangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan perundangan di bidang Metrologi Legal

04 Kelembagaan dan Penilaian

- 04.00 Kelembagaan Metrologi Legal  
Naskah-naskah yang terkait dengan dokumen mengenai pendirian UPTD, serta monitoring dan evaluasi.

- 04.01 Penilaian Metrologi Legal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *surveillance*, bimtek, penilaian UPTD, dan penilaian ulang UPTD.
- 02 Ukuran, Takaran, Timbangan dan Kelengkapan (UTTP) dan Standar Ukuran
- 02.00 Besaran Massa, Listrik, Tekanan dan Suhu  
Naskah yang berkaitan dengan dokumen besaran massa, listrik, tekanan dan suhu.
- 02.01 Besaran Arus, Panjang, dan Volume  
Naskah yang berkaitan dengan dokumen besaran arus, panjang dan volume
- 02.02 SKPPT (Surat Keterangan Pembebasan Persetujuan Tipe)  
Naskah yang berkaitan dengan dokumen surat keterangan pembebasan persetujuan tipe
- 02.03 SKVI (Surat Keterangan Verifikasi Internal)  
Naskah yang berkaitan dengan dokumen surat keterangan verifikasi internal.
- 04 Pembinaan, Komunikasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat (PKP3M)
- 04.00 Alat ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan (UTTP)  
Naskah yang berkaitan dengan:
- Pengawasan UTTP dan Satuan Ukuran
  - Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
  - Penyusunan NSPK
  - Evaluasi
  - Penelaahan kasus untuk pengawasan UTTP
- 04.01 Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)  
Naskah yang berkaitan dengan:
- Pengawasan BDKT dan Satuan Ukuran
  - Peredaran BDKT
  - Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
  - Penyusunan NSPK
  - Evaluasi
  - Penelaahan kasus untuk Pengawasan BDKT dan lain-lain
  - Sertifikasi BDKT
- 04.02 Satuan Ukuran  
Naskah yang berkaitan dengan :
- Pengawasan satuan ukuran Penelaahan kasus untuk penelaahan satuan ukuran

04.03 Komunikasi Publik

Naskah yang berkaitan dengan :

- Penyuluhan
- Forum pengawasan kemetrolgian
- Bimbingan teknis
- Supervisi
- Workshop/seminar dibidang metrologi legal
- Pemahaman penyebaran informasi melalui media cetak media elektronik, media sosial dan lainnya
- Sosialisasi Metrologi Legal.

04.04 Pengaduan Masyarakat

Naskah yang berkaitan dengan :

- Adanya laporan dari masyarakat tentang permasalahan kemetrolgian
- Penelahaan temuan /kasus berdasarkan laporan dari masyarakat
- Pengangan pengaduan masyarakat tentang Metrologi Legal

04.05 Penegakan Hukum

Naskah yang berkaitan dengan penyidikan Metrologi Legal

TN. TERTIB NIAGA

00 Pengawasan Pameran Dagang, Perdagangan Antar Pulau dan Perdagangan Lainnya serta Publikasi Kegiatan Perdagangan

00.00 Pengawasan Pameran Dagang dan Publikasi Kegiatan Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pameran dagang dan publikasi kegiatan perdagangan.

00.01 Pengawasan Perdagangan Antar Pulau dan Perdagangan Lainnya

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan antar pulau dan perdagangan lainnya.

01 Analisa Kasus Perdagangan dan Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan)

01.00 Analisa Kasus Perdagangan

Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisis kasus perdagangan.

- 01.01 Bimbingan Operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan)  
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan operasional PPTN (Petugas Pengawas Tertib Niaga) dan PPNS-DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan).
- 05 Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
  - 02.00 Pengawasan Perizinan Perdagangan Dalam Negeri  
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perizinan kegiatan perdagangan dalam negeri.
  - 03.01 Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik
- 04 Pengawasan Kegiatan Distribusi Barang Pokok dan Penting dan Barang yang Diatur
  - 03.00 Pengawasan Kegiatan Distribusi Barang Pokok dan Penting  
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan distribusi barang pokok dan penting.
  - 03.01 Pengawasan Kegiatan Distribusi Barang yang Diatur  
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan distribusi barang yang diatur.
- 04 Pengawasan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor dan Impor) dan Post Border
  - 04.00 Pengawasan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor dan Impor)  
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan perdagangan luar negeri (ekspor dan impor).

- 04.01 Pengawasan Kegiatan Post Border  
Naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kegiatan post border.

PK. PEMBERDAYAAN KONSUMEN

00 Analisa Perlindungan Konsumen

- 00.00 Penyusunan Regulasi Perlindungan Konsumen  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan, Rancangan Keputusan Menteri Perdagangan, Rancangan Peraturan Direktur Jenderal, Rancangan Keputusan Direktur Jenderal, serta Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

- 00.01 Evaluasi Regulasi Perlindungan Konsumen  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil monitoring implementasi regulasi perlindungan konsumen, hasil evaluasi pelaksanaan regulasi perlindungan konsumen, dan *Regulatory Impact Assesment* (RIA)

01 Pelayanan Pengaduan Konsumen

- 01.00 Konsultasi Pengaduan Konsumen  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Konsultasi dalam rangka perlindungan konsumen.

- 01.01 Penanganan Pengaduan Konsumen  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penanganan Pengaduan Konsumen, tindak lanjut melalui Fasilitasi Pengaduan Konsumen dan lain sebagainya.

02 Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha

- 02.00 Bimbingan Konsumen  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan edukasi perlindungan konsumen, penyuluhan perlindungan konsumen, fasilitasi motivator mandiri bagi masyarakat, pembinaan motivator perlindungan konsumen untuk komunitas.

- 02.01 Bimbingan Pelaku Usaha  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan perlindungan konsumen kepada pelaku usaha melalui sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha.

- 02.02 Publikasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Publikasi perlindungan konsumen melalui berbagai media baik offline maupun online.

### 03 Fasilitasi Kelembagaan

- 03.00 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan, Bimbingan Teknis, Konsultasi Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), dan operasional Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) secara umum.
- 03.01 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan, Pembentukan, Pengangkatan anggota, Pengangkatan anggota Sekretariat, Bimbingan Teknis, Penerbitan Surat Tanda Daftar (STD), dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara umum.
- 03.02 Badan Perlindungan Konsumen Nasional  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberdayaan, rekomendasi dan operasional Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) secara umum.

### 05 Kemitraan Perlindungan Konsumen

- 04.00 Dalam Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama antar Lembaga di dalam negeri, keikutsertaan dalam forum-forum perlindungan konsumen tingkat nasional, dan perjanjian kerjasama.
- 04.01 Luar Negeri  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama antar Lembaga di luar negeri, keikutsertaan dalam forum – forum perlindungan konsumen tingkat internasional, penyusunan posisi runding Indonesia serta implementasi kesepakatan kerjasama perlindungan konsumen internasional.

## BJ. PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

### 00 Produk Logam, Mesin dan Elektronika

- 00.00 Produk Logam dan Mesin  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk logam dan mesin, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.
- 00.01 Produk Elektronika  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk elektronika, antara lain: SK,

surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

01 Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka

01.00 Produk Hasil Pertanian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil pertanian, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

01.01 Produk Hasil Kimia dan Aneka

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk hasil kimia dan aneka, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

02 Jasa

02.00 Jasa Distribusi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa distribusi, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

02.01 Jasa Bisnis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan pengawasan, pengawasan berkala, pengawasan di daerah perbatasan, pengawasan khusus, dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan produk jasa bisnis, antara lain: SK, surat tugas, survei, laporan hasil pengawasan, uji kasat mata dan laboratorium, surat teguran dan berita acara pengambilan sampel.

03 Petunjuk Teknis Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan penyusunan rancangan petunjuk Teknis (Juknis) pengawasan barang beredar.

04 Analisa Kasus Perlindungan Konsumen dan Bimbingan Operasional

04.00 Analisa Kasus Perlindungan Konsumen

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan berupa surat apresiasi atau surat teguran, kerangka analisa kasus hasil pengawasan, dan rekomendasi pelimpahan kasus.

04.01 Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, bimtek terhadap PPBJ dan PPNS-PK.

05 Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen

05.00 Penegakan hukum pengawasan produk logam, mesin dan elektronika dan jasa distribusi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengumpulan bahan keterangan, berkas perkara, laporan kemajuan kegiatan penyidikan, Anatomi Kasus, hingga rekomendasi pencabutan atau pembekuan izin usaha.

05.01 Penegakan Hukum Pengawasan Produk Hasil Pertanian kimia dan Aneka dan Jasa Bisnis  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan satgas dalam rangka pengawasan terpadu, mulai dari SK pembentukan satgas sampai dengan laporan. (SDA)

D. BIDANG PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

PO. PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

- 00 Perundingan dan Bahan-Bahan Terkait Dukungan Pimpinan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan paska perundingan, serta bahan-bahan terkait dukungan Pimpinan
- 01 Pertanian, Keamanan dan Ketahanan Pangan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Pertanian, Keamanan dan Ketahanan Pangan
- 02 Non-Pertanian dan Perdagangan Digital  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Non-Pertanian dan Perdagangan Digital
- 03 Instrumen Pengamanan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Instrumen Pengamanan.
- 04 Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO
- 05 Subsidi Perikanan dan Perjanjian Perizinan Impor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Subsidi Perikanan dan Perjanjian Perizinan Impor

- 06 HKI, Investasi, Lingkungan, dan Pembangunan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang HKI, Investasi, Lingkungan, dan Pembangunan
- 07 Kepatuhan dan Transparansi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persiapan perundingan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil sidang di Bidang Kepatuhan dan Transparansi
- 08 Konsultasi Publik  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan pemahaman stakeholders, melalui konsultasi publik, Workshop, Focus Group Discussion, Dialog Series, dan lain-lain

#### PA. PERUNDINGAN ASEAN

- 00 Fasilitasi Perdagangan Barang ASEAN (Akses Pasar dan Kepabeanan)
  - 00.00 Persiapan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang
  - 00.01 Pelaksanaan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembahasan Perundingan serta brafaks hasil sidang
  - 00.02 Laporan Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain)
  - 00.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan
- 01 Investasi Usaha Kecil dan Menengah dan daya saing isu-isu ASEAN
  - 01.00 Persiapan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang terkait Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN.
  - 01.01 Pelaksanaan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait investasi, usaha kecil, dan menengah, daya saing dan isu - isu ASEAN.
  - 01.02 Laporan Hasil Sidang Perundingan (revisi Dir. ASEAN)  
Naskah-naskah yang yang berkaitan dengan laporan laporan hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN

- 01.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil Perundingan Investasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Daya Saing dan Isu-isu ASEAN.
- 02 ASEAN Mitra Dialog
  - 02.00 Persiapan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal Kementerian, antar kementerian/lembaga, posisi runding, serta materi sidang.
  - 02.01 Pelaksanaan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembahasan Perundingan serta brafaks hasil sidang.
  - 02.02 Laporan Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan seperti ketentuan tarif barang ASEAN dan lain-lain).
  - 02.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan mitra dialog.
- 03 Kerja sama Antar dan Sub Regional
  - 03.00 Persiapan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding dan juga materi sidang.
  - 03.01 Pelaksanaan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan, dan laporan hasil perundingan.
  - 03.02 Laporan Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.
  - 03.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan.
- 04 Proses Ratifikasi Agreement  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses ratifikasi *agreement*.
- 05 Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah Tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Desiminasi/Konsultasi Publik Pusat dan Daerah
- AO. ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
  - 00 Akses Perdagangan dan Akses Investasi Perundingan APEC

- 00.00 Persiapan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.
  - 00.01 Pelaksanaan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.
  - 00.02 Laporan Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.
  - 00.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.
- 01 Fasilitasi Perdagangan dan Fasilitasi Perundingan APEC
- 01.00 Persiapan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.
  - 01.01 Pelaksanaan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.
  - 01.02 Laporan Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.
  - 01.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.
- 02 ITRC
- 02.00 Perundingan Organisasi Komoditi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.
  - 02.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
  - 02.02 Data Komoditi Internasional  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
- 03 IRCo
- 03.00 Perundingan Organisasi Komoditi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.

- 03.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
- 03.02 Data Komoditi Internasional  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
- 04 ANRPC
  - 04.00 Perundingan Organisasi Komoditi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.
  - 04.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
  - 04.02 Data Komoditi Internasional  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
- 05 APCC
  - 05.00 Perundingan Organisasi Komoditi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.
  - 05.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
  - 05.02 Data Komoditi Internasional  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
- 06 ISO
  - 06.00 Perundingan Organisasi Komoditi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.
  - 06.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
  - 06.02 Data Komoditi Internasional  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.

07 ICO

- 07.00 Perundingan Organisasi Komoditi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.
- 07.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
- 07.02 Data Komoditi Internasional  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.

08 ICCO

- 08.00 Perundingan Organisasi Komoditi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.
- 08.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
- 08.02 Data Komoditi Internasional  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.

09 IPC

- 09.00 Perundingan Organisasi Komoditi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses persiapan perundingan serta hasil/pasca perundingan, termasuk tindak lanjut hasil perundingan.
- 09.01 Tindak Lanjut Hasil Sidang  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.
- 09.02 Data Komoditi Internasional  
Naskah-naskah yang terkait dengan data komoditi internasional.

10 Organisasi Kerjasama Islam

- 10.00 Persiapan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.
- 10.01 Pelaksanaan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.

10.02 Laporan Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.

10.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.

## 11 Developing-8

11.00 Persiapan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.

11.01 Pelaksanaan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.

11.02 Laporan Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.

11.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.

## 12 G-20

12.00 Persiapan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang.

12.01 Pelaksanaan Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan dan brafaks hasil sidang.

12.02 Laporan Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan.

12.03 Tindak lanjut Hasil Perundingan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan seperti pertemuan teknis, konsultasi publik, dan lain-lain.

## 13 Diseminasi Hasil Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan diseminasi.

## PB. PERUNDINGAN BILATERAL

### 00 Pra Perundingan

#### 00.00 Persiapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan perundingan seperti kertas posisi, agenda, dan lain-lain.

#### 00.01 Draft Perjanjian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan draft perjanjian sampai draft tersebut tersusun.

### 01 Perundingan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan perundingan meliputi *trade agreement*, *MoU*, *Joint Statement*, *Agreed Minutes*, dan *Preferential Trade Agreement*. FTA, CEPA, ECA, BTMF, Sub.Mission on GSP dan sebagainya.

### 02 Pasca Perundingan

#### 02.00 Konsultasi Publik di Pusat dan Daerah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses dan laporan kegiatan.

#### 02.01 Proses Ratifikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan naskah penjelasan, rancangan peraturan presiden, terjemahan serta naskah perjanjian.

## PJ. PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

### 00 Jenis Perundingan Jasa (Jasa Bisnis, Jasa distribusi, dan keuangan, Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga, Jasa pendidikan dan kesehatan, Jasa komunikasi, lingkungan, dan energi, Jasa transportasi dan logistik.

#### 00.00 Persiapan Perundingan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat internal kementerian, posisi runding serta materi sidang terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia - Australia, Indonesia - Jepang, ASEAN - Jepang, Multilateral (WTO), IE - CEPA, Indonesia - Taiwan.

#### 00.01 Pelaksanaan Perundingan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan perundingan serta brafaks hasil sidang terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia - Australia, Indonesia - Jepang, ASEAN - Jepang, Multilateral (WTO), IE - CEPA, Indonesia - Taiwan.

#### 00.02 Laporan Hasil Perundingan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA,

RCEP, Indonesia – Australia, Indonesia – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, Indonesia - Taiwan.

00.03 Tindak Lanjut Hasil Perundingan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil perundingan terkait IEU CEPA, APEC, IKCEPA, TPP, ASEAN Caucus, AFAS 10, MNO Agreement, AC FTA, AANZ FTA, RCEP, Indonesia – Australia, Indonesia – Jepang, ASEAN – Jepang, Multilateral (WTO), IE – CEPA, Indonesia - Taiwan.

01 *Rules*, peraturan *domestic* dan penyusunan analisis informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peraturan domestik dan penyusunan analisis informasi terkait jasa bisnis, jasa distribusi, jasa keuangan, jasa konstruksi, jasa pariwisata, jasa rekreasi budaya dan olahraga, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa lingkungan, jasa energi, jasa transportasi, jasa logistik, jasa e-commerce.

02 Konsultasi Publik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi publik seperti *Workshop*, *Focus Group Discussion*, *Dialog Series*, dan lain-lain terkait workshop, Focus Group Discussion, Dialogue series, konsultasi Publik, rapat koordinasi.

E. BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

IE. PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR

00 Pengembangan Pasar Ekspor

00.00 Analisa Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan *Market Intelligent*, survei data dan lapangan, *Market Brief* penyedia informasi ringkas pasar tujuan ekspor, laporan hasil kegiatan, serta peta pasar tujuan ekspor.

00.01 Penyebarluasan Informasi dan Peluang Pasar Ekspor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan diseminasi dan laporan hasil penyebarluasan informasi dan peluang pasar ekspor.

01 Pengembangan Sistem Informasi Ekspor

01.00 Pengelolaan Data Ekspor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data, pemutakhiran data serta neraca perdagangan dan analisis informasi ekspor.

01.01 Sistem Informasi Ekspor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi, situs website, termasuk implementasi aplikasi online, bimbingan teknis, *membership* sistem dan promosi online, data member serta pengelolaan jaringan informasi.

02 Pelayanan Informasi Ekspor

- 02.00 Pelayanan Pelaku Usaha  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan *customer service center* data pelaku usaha, *Gathering, permanent trade display, inquiry*, dan juga pemberian penghargaan primaniryarta dan primaduta.
- 02.01 Publikasi Informasi Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan publikasi informasi ekspor berupa *leaflet*, brosur, dan lain-lain.

KE. KERJASAMA PENGEMBANGAN EKSPOR

00 Luar Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah)

- 00.00 MoU/Perjanjian Kerja Sama  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/Perjanjian pengembangan ekspor hingga pelaporan.
- 00.01 Aktivasi/diseminasi Implementasi Hasil Kerja Sama Pengembangan Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi pengembangan ekspor hingga pelaporan.
- 00.02 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.

01 Dalam Negeri (Pemerintah dan Non Pemerintah)

- 01.00 Identifikasi Kerjasama Pengembangan Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi kerja sama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan.
- 01.01 Mou/Perjanjian Kerja Sama  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan MoU/Perjanjian kerja sama dalam negeri hingga pelaporan.
- 01.02 Aktivasi/Diseminasi Implementasi Hasil Kerjasama Pengembangan Ekspor  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan aktivasi/diseminasi implementasi hasil kerjasama pengembangan ekspor dalam negeri hingga pelaporan.
- 01.03 Monitoring dan Evaluasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.

PE. PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR

- 00 Produk Primer (pertambangan, perkebunan, perikanan, peternakan, agro dan produk lainnya yang masuk kategori produk Primer)
  - 00.00 Identifikasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi produk, eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan kegiatan.
  - 00.01 Pengembangan Produk  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, *rebranding*, pembuatan laporan dan lain-lain.
  - 00.02 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
  - 00.03 Pengembangan Desain  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain award dan kegiatan lain terkait dengan pengembangan produk.
- 01 Produk Manufaktur (makanan & minuman, kayu, kimia, logam dan produk lain yang masuk kategori produk manufaktur)
  - 01.00 Identifikasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi produk, eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan kegiatan.
  - 01.01 Pengembangan Produk  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, *rebranding*, pembuatan laporan dan lain-lain.
  - 01.02 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
  - 01.03 Pengembangan Desain  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain award dan kegiatan lain terkait dengan pengembangan produk.
- 02 Produk Jasa
  - 02.00 Identifikasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.

- 02.01 Pengembangan Produk  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, rebranding.
  - 02.02 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
  - 02.03 Pengembangan Desain  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain award.
- 03 Produk Kreatif (media dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya dan desain serta Produk lainnya yang termasuk kategori produk kreatif).
- 03.00 Identifikasi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial sampai pembuatan laporan hasil audit.
  - 03.01 Pengembangan Produk  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan produk seperti adaptasi produk, diseminasi hasil pengamatan produk, rebranding.
  - 03.02 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.
  - 03.03 Pengembangan Desain  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan desain berupa seleksi designer dispatch services (DDS), pelaksanaan DDS, pelayanan informasi desain, klinik desain, workshop desain, desain award.

#### PC PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA

- 00 Promosi Dagang (Dalam Negeri dan Luar Negeri)
  - 00.00 Partisipasi Pameran Dagang  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi pameran dagang mulai dari undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil pameran.
  - 00.01 Partisipasi Misi Dagang  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi dagang mulai dari undangan calon peserta sampai pembuatan laporan hasil misi dagang.
  - 00.02 Partisipasi Misi Pembelian  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan partisipasi misi pembelian mulai dari koordinasi perwakilan luar negeri sampai pembuatan laporan hasil misi pembelian

- 00.03 Sosialisasi Promosi  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi promosi mulai dari survei ke calon peserta sampai pembuatan laporan hasil sosialisasi promosi.
- 01 Pencitraan
  - 01.00 Perencanaan  
Naskah yang berkaitan dengan pembuatan video nation branding, Focus Group Discussion, pembuatan video peningkatan citra produk indonesia, serta laporan hasil kegiatan.
  - 01.01 Penerapan Citra  
Naskah yang berkaitan dengan penerapan citra, yaitu pembuatan video nation branding, kegiatan terkait aktivitas ekspor, pembuatan kit promosi serta laporan hasil kegiatan dan lain-lain.
  - 01.02 Pemantauan dan Evaluasi  
Naskah yang berkaitan dengan kuesioner pemantauan dan evaluasi, serta laporan hasil kegiatan.
- F. BIDANG PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
UD. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
  - 00 Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)
    - 00.00 Rancangan Undang-undang  
Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Undang-Undang mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.
    - 00.01 Rancangan Peraturan Pemerintah  
Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.
    - 00.02 Rancangan Peraturan Presiden  
Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden mulai dari rancangan awal sampai diundangkan.
    - 00.03 Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan  
Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan mulai dari rancangan awal sampai ditetapkan.
    - 00.04 Peraturan/Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi  
Naskah-naskah yang berkaitan penyusunan Peraturan/Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi.

01 Pelayanan Hukum

01.00 Penegakan Hukum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan, kegiatan penyidik PPNS, Berkas administrasi serta penyegaran PPNS.

01.01 Pemberian Pelayanan Hukum  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi hukum serta asistensi hukum terhadap pengaduan.

01.02 Penanganan Perkara  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan/gugatan/Laporan kepolisian, pra peradilan, perdata, tata usaha negara, arbitrase.

02 Penindakan Pelanggaran

02.00 Pelanggaran Ilegal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ilegal.

02.01 Pelanggaran Legal  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penindakan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Legal.

PF. PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS

00 Pengawasan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan, dan monitoring pengawasan transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik.

00.00 Pengawasan Transaksi PBK  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pelaku usaha PBK.

00.01 Pengawasan Transaksi Pasar Fisik  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan transaksi pasar fisik.

01. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan dan Keuangan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Fisik

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan koordinasi pengawasan kepatuhan kegiatan dan keuangan di bidang perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik.

01.00 Pengawasan Kepatuhan PBK  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha PBK.

- 01.01 Pengawasan Kepatuhan Pasar Fisik  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaku usaha Pasar Fisik.
  
  - 02. Audit Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan, dan monitoring audit terhadap pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Pasar Fisik, serta Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
    - 02.00 Pengawasan Audit PBK  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan audit pelaku usaha PBK.
    - 02.01 Pengawasan Audit Pasar Fisik  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan audit pelaku usaha Pasar Fisik.
    - 02.02 Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengawasan Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di bidang perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik.  - 03. Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan/persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan koordinasi pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas,
    - 03.00 Pengawasan Sistem Resi Gudang  
Naskah yang berkaitan dengan pengawasan terhadap gudang dan pengelola gudang, pengawasan terhadap bank penyalur pembiayaan skema resi gudang, database transaksi dan kelembagaan Sistem Resi Gudang sampai pembuatan laporan hasil pengawasan.
    - 03.01 Pengawasan Pasar Lelang Komoditas  
Naskah yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang meliputi tertib administrasi, tata cara pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas, data transaksi dan realisasi pasar lelang komoditas serta laporan hasil pengawasan.
- BK. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (PBK)**
- 00 Penguatan Perdagangan Berjangka Komoditi (pelaku pasar dan kelembagaan)
    - 00.00 Pemberian Ijin Usaha dan Persetujuan Perdagangan Berjangka Komoditi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ijin usaha pialang berjangka, pedagang berjangka, bursa berjangka, kliring berjangka, pemberian izin wakil pialang

berjangka, bank penyimpan margin, persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka, persetujuan penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), persetujuan peserta SPA, persetujuan perubahan alamat pelaku usaha PBK, pemberian perubahan nama pelaku usaha PBK, persetujuan pialang untuk penyaluran amanat nasabah bursa luar negeri, persetujuan perubahan pengurus/pemegang saham pelaku usaha PBK, persetujuan pemberhentian direktur kepatuhan, persetujuan untuk melakukan kegiatan promosi/iklan, pelatihan dan pertemuan dibidang PBK, dan persetujuan lainnya di bidang PBK, mulai dari proses awal sampai akhir.

- 00.01 Pencabutan Izin Pelaku Usaha dan Kelembagaan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pencabutan izin pelaku usaha dan kelembagaan.
  - 00.02 Database Pelaku Usaha PBK  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Database Pelaku Usaha PBK.
  - 00.03 Pelatihan Teknis/Workshop/Sosialisasi/*Focus Group Discussion* bagi pelaku usaha PBK  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan teknis dan lain-lain bagi pelaku usaha PBK.
  - 00.04 Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Uji Profesi wakil pialang berjangka.
- 01 Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
- 01.00 Pemberian Persetujuan  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberian persetujuan mulai dari persetujuan peraturan dan tata tertib (PTT) bursa dan lembaga sampai persetujuan kontrak berjangka.
  - 01.01 Pengembangan Kelembagaan dan Produk PBK  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis pengembangan kelembagaan dan produk PBK termasuk kegiatan pertemuan teknis, FGD, dan lain-lain.
- 02 Pengembangan Data dan Teknologi Informasi
- 02.00 Pengembangan Data  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan data, seperti statistik data harga komoditi, pasar berjangka, data statistik bursa berjangka, dan pengelolaan sistem informasi harga komoditi.
  - 02.01 Teknologi Informasi  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan panduan pengguna aplikasi, *Lisensi software windows server*, serta terkait sistem informasi lainnya.

- 03 **Monitoring dan Evaluasi**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengembangan PBK.
- SP. **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG (SRG) DAN PASAR LELANG KOMODITAS (PLK)**
- 00 **Pembinaan SRG**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan SRG meliputi koordinasi dengan *stakeholder* terkait SRG, asistensi dan pendampingan pelaku usaha SRG, dan penyaluran skema subsidi resi gudang.
- 01 **Pembinaan PLK**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan PLK meliputi koordinasi dengan *stakeholder* terkait PLK, serta asistensi dan pendampingan pelaku usaha PLK.
- 02 **Persetujuan SRG**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian persetujuan Lembaga SRG
- 03 **Persetujuan PLK**  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian persetujuan Lembaga PLK serta Peraturan Tata Tertib (PTT) penyelenggaraan PLK.
- 04 **Pengembangan SRG dan PLK**
- 04.01 **Pengembangan Kelembagaan dan Produk**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisa pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan PLK, *Focus Group Discussion*, dan lain-lain.
- 04.02 **Kajian SRG dan PLK**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan kajian dalam rangka penyusunan kebijakan SRG dan PLK.
- 04.03 **Pengembangan Data dan Informasi**  
Naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan informasi di bidang SRG dan PLK serta pengelolaan sistem informasi SRG dan PLK.
- 05 **Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/ *Workshop***  
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan teknis SRG dan PLK, sosialisasi, *workshop*, dan lain-lain.

06 Monitoring dan Evaluasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SRG, PLK dan Kredit program SRG.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

